

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif ini berfokus pada pengaruh pemberitaan *online* kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan terhadap opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai BPJS Kesehatan. Peneliti mengangkat fenomena ini dikarenakan banyaknya berita yang sudah beredar dan bermunculan terus-menerus di berbagai media massa khususnya media *online* karena adanya kenaikan tarif iuran pada BPJS Kesehatan yang meningkat hingga mencapai 100% besarnya. Sedangkan pengguna BPJS sendiri sudah cukup banyak dari kalangan bawah hingga ke atas. Kejadian ini sangat berpengaruh di masyarakat Indonesia terutama pengguna BPJS. Kemudian alasan peneliti memilih opini pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya, karena Kota Surabaya sudah dikenal menjadi menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Tidak hanya itu, pengguna jaminan sosial BPJS Kesehatan di Surabaya memiliki jumlah yang besar. Oleh karena itu, memberi dampak yang besar juga terhadap Kota Surabaya.

Dalam teori model komunikasi peneliti menggunakan teori yang dikemukakan dari Harold D. Lasswell yang merupakan setiap proses komunikasi secara berlangsung mempunyai efek atau pengaruh menurut kepercayaan Harold D. Lasswell (Baran dan Davis, 2012: 186). Lasswell menjelaskan dalam penggambaran komunikasi dengan menjawab pertanyaan berikut “*Who – Says*

*What – In Which Channel – To Whom – With What Effect?*”. Teori menyampaikan penjelasan bahwa sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator melalui media kepada komunikan yang menimbulkan efek tertentu. Berdasarkan uraian tersebut Lasswell menurunkan *five elements of communication* yaitu *Source* (Sumber atau Komunikator), *Message* (Pesan), *Channel* (Saluran atau Media), *Receiver* (Penerima atau Komunikan), dan *Effect* (Efek) (McQuail dan Windahl, 1993: 13-15). Pesan yang disampaikan oleh komunikator ialah pemberitaan “Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan”. Pesan tersebut disampaikan melalui media *online* untuk komunikannya (pembaca berita *online*). lalu efek apa yang diterima komunikan setelah membaca berita dari media *online* tersebut.

Efek tersebut nantinya akan membuat komunikan menerima banyak pengetahuan mengenai informasi dari pemberitaan “Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan”. Pengetahuan tersebut akan membentuk suatu opini dari masyarakat yang membacanya. Dalam buku opini publik (Sunarjo, 1997: 33), William Albright menjelaskan bahwa opini merupakan reaksi perdana dimana seseorang masih memiliki perasaan ragu atau dilema terhadap suatu persoalan dan adanya penilaian terhadap persoalan itu sehingga mendorong orang untuk memperselisihkan hal tersebut. Opini juga adalah suatu hal kontroversial sehingga menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda mengenai suatu masalah atau persoalan tersebut. Dalam hal ini opini juga dikatakan sebagai tanggapan dari suatu permasalahan atau persoalan tersendiri umumnya bukan reaksi yang *random*, tetapi tertanam berdasarkan sistem koheren kepercayaan dengan nilai serta pengharapan yang pantas (Nimmo dalam Eddison, 2015: 4).

Pembentukan opini tersebut terjadi karena pemberitaan yang muncul dalam media massa. Buku *Jurnalistik Terapan* (Yunus, 2012: 27) menyatakan media massa adalah sarana atau alat komunikasi sebagai media penyalur dalam mempublikasikan berita kepada khalayak. Kemampuan media massa juga dapat menjangkau khalayak yang berjumlah besar. Dengan adanya media massa maka salah satu cara untuk mendapatkan atensi publik adalah dengan berita.

Dengan adanya media massa maka salah satu cara untuk mendapatkan atensi publik adalah dengan berita. McQuail (Dalam Nugraheni dan Purnama, 2013: 61) juga menyebutkan media massa seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal seperti menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi, mendefinisikan dan membentuk suatu opini masyarakat. Salah satu media yang sering digunakan dalam membentuk opini masyarakat adalah berita. Berita telah lama dipergunakan untuk penyebaran informasi. Pernyataan ini semakin memperkuat bahwa pemberitaan di media massa memiliki pengaruh terhadap membentuk suatu opini dari masyarakat.

Menurut Dr. Williard G. Bleyer pengertian berita merupakan segala suatu hal yang hangat serta menarik atensi banyak khalayak dan berita yang terbaik adalah berita yang bisa menarik perhatian khalayak (Suhandang dalam Elton, 2007: 101). Dalam berita juga berisikan suatu laporan informasi yang di publikasikan secara cepat mengenai fakta atau opini yang membuat orang tertarik

atau merasa bahwa berita yang dilaporkan penting ataupun keduanya bagi sejumlah khalayak umum.

Menurut Sumadiria (Dalam Fajar dan Restivia, 2011: 174) mendefinisikan berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam media, karena berita tersebut menarik minat atau mempunyai makna bagi khalayak atau karena dapat menarik para khalayak untuk mengikuti berita tersebut. Dalam berita berisikan suatu laporan informasi dan di publikasikan secara cepat mengenai fakta atau opini yang membuat orang tertarik atau merasa bahwa berita yang dilaporkan penting ataupun keduanya bagi sejumlah khalayak umum (Charnley dalam Effendy, 2007: 131).

Dari pemberitaan yang diberikan oleh media massa maka opini masyarakat akan berbeda-beda. Ada opini positif yang dinyatakan setuju akan berita tersebut. Ada juga negatif berbanding terbalik dengan positif yaitu tidak setuju. Tetapi masyarakat ada juga yang mempunyai opini netral. Opini netral ini menampilkan tidak memihak atau tidak memilih kubu positif maupun negatif. (Effendy dalam Sugianto, 2017: 4-5).

**Gambar I.1.**  
**Logo BPJS Kesehatan**



Sumber: Antaranews.com

Berdasarkan muatan publikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), kenaikan ini terjadi karena peserta mandiri atau PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang mendaftar hanya pada waktu sakit saja lalu memerlukan layanan kesehatan yang memiliki ongkos mahal dan berhenti membayar iuran jaminan sosial sesudah mendapatkan layanan kesehatan tersebut dan sembuh hingga tingkat keaktifan mereka hanya sekedar 53,7% pada akhir tahun anggaran 2018, besar utang atau tunggakan yang didapat mencapai sekitar 15 triliun. Untuk *claim ratio* mereka mencapai 313% pada 2018 serta total klaim sudah mencapai hingga 27,9 triliun. Sedangkan, iuran yang sudah dikumpulkan total klaim mencapai hingga 8,9 triliun saja. Oleh penyebab tersebut, defisit terjadi akibat besaran iuran yang merugikan ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)).

Selain faktor penyebab utama tersebut, terdapat beberapa faktor lain juga seperti pada layanan, dalam hal manajemen klaim dan strategi pembayaran belum sempurna. Oleh sebab itu, Jaminan Kesehatan Nasional ini melakukan meningkatkan perbaikan agar sistem ini berlangsung dengan baik bersama lembaga – lembaga yang terkait ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)).

Tidak hanya situs resmi [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) saja yang memberikan penjelasan mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, Kompas.com juga melansir berita tersebut bahwa iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100% mulai per tanggal 1 Januari 2020 dan dalam hal ini sudah tertulis dalam peraturan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang sudah ditanda tangani oleh presiden Jokowi dalam UU Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Nasional. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri untuk meningkatkan

serta memperbaiki kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan seperti yang sudah tertulis dalam peraturan tersebut. Kenaikan sebesar 100% ini hanya berlaku untuk pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri yang berada di kelas 1 dengan kelas 2. Sedangkan, untuk peserta kelas 3 hanya naik sebesar 65% (kemenkeu.go.id).

Besaran kenaikan tarif iuran Jaminan Sosial BPJS untuk kelas I dari harga awal Rp. 80.000 menjadi sejumlah Rp. 160.000. Lalu selanjutnya, untuk kelas II yang awal harganya Rp. 51.000 menjadi sebesar Rp. 110.000, dan untuk kelas III harga awalnya Rp. 25.500 per bulan menjadi sejumlah Rp. 42.000. Hal ini tertulis dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Pemberitaan tersebut dimuat pada 1 Januari 2020 (N.R. Aida, 2020, kompas.com).

**Gambar I.2.**  
**Iklan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020**



Sumber: Katadata.co.id

Ada juga berita terkait mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini yang dilansir oleh liputan6.com pada 21 April 2020, bahwa Makamah Agung (MA) meminta pembatalan kenaikan pada kenaikan tarif iuran BPJS sejak 27

Februari 2020 perihal ini juga telah dilansir [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) pada 9 Maret 2020. Lalu, bulan April, pemerintah menyetujui keputusan MA dan memberlakukan kembali iuran BPJS dengan tarif yang sama atau normal mulai dari 1 April 2020 (Illyas Istaniur Praditya, [Liputan6.com](http://Liputan6.com), 2020).

Pada 30 April 2020 dilansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), bahwa iuran BPJS Januari hingga Maret tetap dihitung naik. Terdapat berita lagi pada 13 Mei 2020 dimuat oleh [galuh.id](http://galuh.id) bahwa Tarif iuran BPJS naik lagi mulai Juli 2020. Bapak Jokowi memutuskan hal ini untuk kelas I dan II sedangkan untuk Kelas III akan naik pada tahun 2021. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan kebijakan ini telah ditetapkan 5 Mei 2020. Untuk tarif iuran Kelas III di tahun 2020, iuran akan dibayar sebesar 25.500/bulan. Sisanya akan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. Namun untuk 2021, peserta Kelas III hanya membayar Rp. 35.000/bulan. Sisanya dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran ([Cnnindonesia.com](http://Cnnindonesia.com), 2020).

**Gambar I.3.**  
**Rincian Skema Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan**



Sumber: Kompas.com

Berita termuat dari bpjs-kesehatan.go.id pada 30 Juni 2020 tertulis, bahwa untuk peserta kelas I dan peserta kelas II pengguna BPJS Kesehatan yang merasa kurang mampu untuk membayar kenaikan tarif iuran, BPJS Kesehatan memfasilitasi penyesuaian atau perpindahan kelas. Lalu, terdapat laporan bahwa para peserta BPJS Kesehatan terjadi penurunan kelas hingga sebesar 1,57 juta. Hal ini diperincikan sejumlah 209.303 orang yang merupakan peserta kelas I turun ke Kelas II. Lantas yang turun dari kelas I ke kelas III sebanyak 342.000 orang. Tetapi untuk yang turun dari kelas II ke Kelas III sebesar 1.024.646 jiwa (Chandra Gian Asmara, Cnbcindonesia.com, 2020). Berita ini dipublikasikan oleh cnbcindonesia.com pada 17 September 2020.

#### **Gambar I.4. Berita Terkait Pendapat Dari Masyarakat**

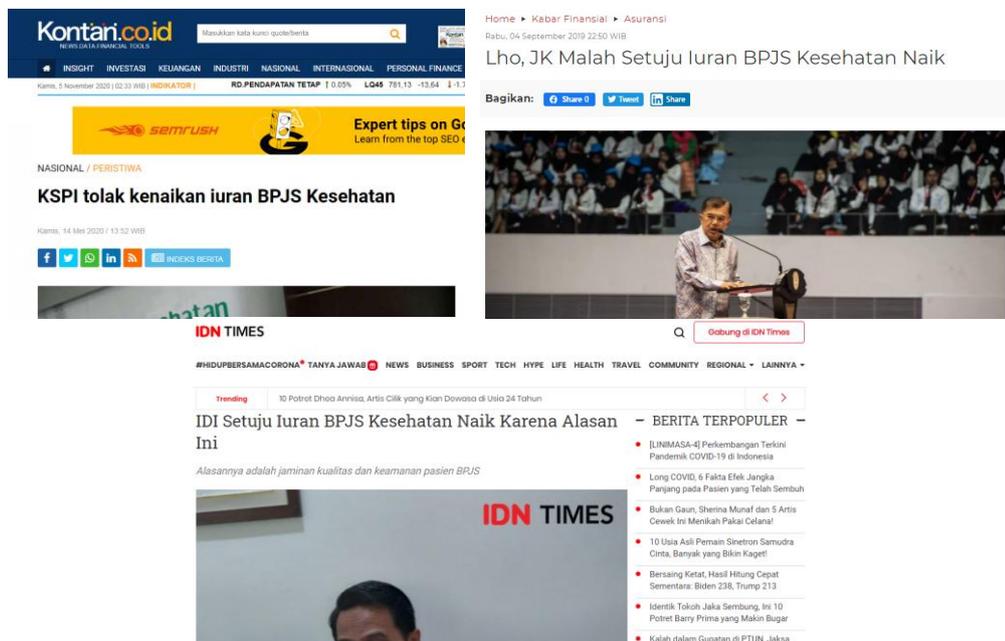


Sumber: Finansial.bisnis.com

Pemberitaan ini pun juga menjadi perbincangan masyarakat yang telah mengetahui bahwa tarif BPJS Kesehatan akan naik. Adanya pro dan kontra dengan permasalahan ini. Seperti contohnya Ibu rumah tangga asal Bandung yang bernama Kanti Martiana. Bahwa beliau setuju akan akan kenaikan ini. Ia berpendapat dengan adanya peningkatan iuran BPJS Kesehatan pelayananpun

menjadi semakin baik dan akan memperlancar pembayaran klaim serta meningkatkan kondisi keuangan di rumah sakitpun. Tak hanya itu, ia juga beropini bahwa untuk mengurangi beban para pekerja rumah sakit harus memiliki kondisi keuangan yang baik juga sehingga dapat melayani pasien dengan fokus. Hal ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan rumah sakit sendiri. Berbanding terbalik dengan Ibu Kanti serta Putri. Maryam Nurbaitah, seorang karyawan swasta di Jakarta ini menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan bagi para pekerja informal karena banyak sekali peserta mandiri yang bekerja di sektor informal. Ia pun juga memberi saran akan kenaikan ini memiliki regulasi yang lebih tepat sasaran dan tidak memukul rata peserta mandiri (Wibi Pangestu Pratama, Finansial.bisnis.com, 2019).

### Gambar I.5. Berita Terkait Tolak Serta Setuju dengan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan



Sumber: Nasional.kontan.co.id, Wartaekonomi.co.id, dan Idntimes.com

Pemberitaan ini pun menuai perdebatan dan adanya perbedaan opini dari beberapa oknum tak hanya dari masyarakat saja. KSPI bahkan menolak adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan berbeda halnya dengan Jusuf Kalla serta IDI yang setuju dengan perihal tersebut. KSPI memberikan opininya bahwa melanggar pasal yang sudah ditetapkan serta memberatkan masyarakat dan seharusnya peraturan tidak boleh seenaknya menaikkan iuran karena BPJS Kesehatan ini untuk masyarakat (Ratih Waseso, nasional.kontan.co.id, 2020). Sedangkan Jusuf Kalla setuju agar meningkatkan pelayanan lebih berkualitas dan menegaskan hal ini dilakukan agar menyelesaikan masalah defisit yang sudah ada serta bagi Jusuf Kalla mengingat permintaan dari masyarakat yang menginginkan penyakit kanker juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan (Redaktur WE Online, Wartaekonomi.co.id, 2019). IDI pun juga setuju akan hal ini dan opini yang diberikanpun hampir sama dengan Jusuf Kalla (Lia Hutasoit, Idntimes.com, 2019).

### Gambar I.6. Berita Terkait Warga Surabaya Mengenai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan



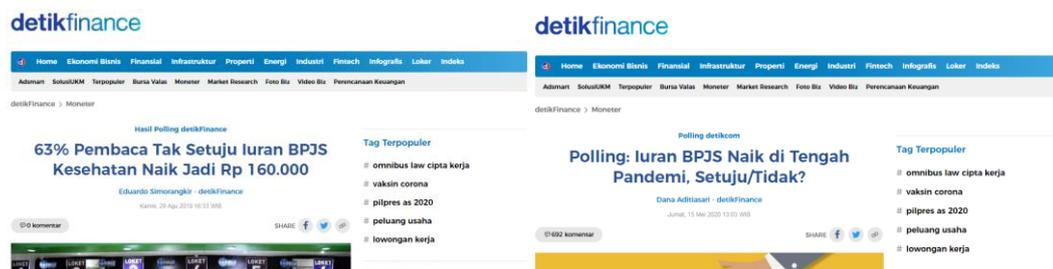
Sumber: Merdeka.com dan Viva.co.id

Akibat dari kenaikan ini pun sampai didengar oleh warga Surabaya yang bernama M Sholeh bahwa ia akan melakukan gugatan. Pemberitaan pada 31 Oktober 2019 yang dipublikasikan oleh merdeka.com ini juga menjelaskan alasan

mengapa M Sholeh menggugat. Alasannya karena ekonomi masyarakat Indonesia bukanlah tinggi serta dipertanyakan kembali manfaat apa yang akan nantinya diberikan. Seharusnya jika BPJS Kesehatan salah perhitungan jangan jadikan rakyat untuk menanggung hal tersebut. Tak sampai situ saja, M Sholeh juga menyatakan agar dikembalikan seperti Jamkesda. Hal ini akan sangat membantu orang yang tidak mampu akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang bagi M Sholeh sudah salah, karena orang yang mampu juga bisa ikut BPJS serta keluhan dari masyarakat sendiri tidak hanya pada orang biasa, pekerja juga ikut mengeluh sebab dulu perusahaan sudah memiliki kerjasama pada asuransi swasta yang lebih bagus tetapi sekarang harus dipaksa mengikuti BPJS Kesehatan. M Sholeh sampai mengatakan agar BPJS Kesehatan dibubarkan saja (Erwin Yohanes, Merdeka.com, 2019).

Warga Surabaya tak hanya memberikan opini serta gugatan tetapi melakukan aksi tumpengan juga di Pengadilan Surabaya pada saat Makamah Agung juga ikut menyetujui pembataan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ini (Hardani Triyoga dan Nur Faishal, Viva.co.id, 2020). Pemberitaan ini dilansir oleh viva.co.id pada 10 maret 2020. Aksi serta opini warga Surabaya juga terlihat dalam pemberitaan mengenai permasalahan ini. Karena itulah peneliti memilih warga Surabaya sebagai subjek penelitian.

## Gambar I.7. Berita Terkait Polling Mengenai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan



Sumber: Finance.detik.com

Hal ini ternyata direspons negatif oleh pembaca **detikFinance**. Berdasarkan polling yang dibuat di Twitter @detikfinance, sebanyak 63% memilih tak setuju iuran BPJS dinaikkan menjadi Rp 160.000. Sisanya, 25% menyatakan setuju naik dan 12% memilih tidak peduli.

Dalam 24 jam, sebanyak 10.385 akun Twitter mengikuti polling tersebut. Polling tersebut juga direply 528 kali, diretweet 61 kali dan disukai 64 kali.

Finance.detik.com telah melakukan polling di tahun 2019 agar mengetahui seberapa banyak masyarakat yang setuju dan tidak setuju akan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini. Polling tersebut dilakukan saat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan akan naik pada 1 Januari 2020 (Eduardo Simorangkir, Finance.detik.com, 2019). Lalu tak lama di tahun 2020 sumber laman berita tersebut melakukan polling lagi pada saat kenaikan iuran BPJS akan kembali mulai Juli 2020. Hasil yang diberikan total 98 orang setuju dan total 574 orang tidak setuju (Dana Aditiasari, Finance.detik.com, 2020).

Hal ini dapat terlihat, masyarakatpun juga ikut memperdebatkan permasalahan ini. Banyak sekali opini-opini yang muncul bahkan adanya polling yang sudah saya lansirkan yang terlihat jelas hasil polling pada saat kenaikan tarif iuran mulai 1 Januari 2020 bahkan hingga kenaikan akan kembali pada Juli 2020

masih banyak diperdebatkan. Pemberitaan ini menimbulkan kontroversial karena ada yang setuju dan tidak setuju mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini. Maka mendorong masyarakat memperselisihkan perbedaan pandangan hal tersebut. Bahkan oknum-oknum seperti KSPI, IDI dan Jusuf Kalla juga ikut menyuarakan hal ini juga.

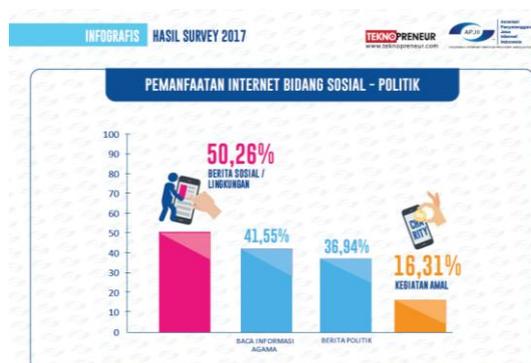
Fenomena ini termuat dalam pemberitaan berbagai media *online* secara terus-menerus. Pemberitaan terkait mengenai kenaikan tarif iuran BPJS ini selalu bermunculan tiap bulannya. Mulai dari Oktober 2019 hingga Juli 2020 pemberitaan tersebut tak pernah berhenti dipublikasikan. Pemberitaan yang awalnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai naik 1 Januari 2020 lalu disambung dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tak jadi naik untuk April hingga Mei 2020. Dilanjut lagi dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai Juli 2020. Pemberitaan yang sangat menghebohkan masyarakat Indonesia karena banyak sekali permasalahan dalam kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini. Pemberitaannya tersebut saling berkaitan tetapi tetap dengan satu permasalahan yang besar yaitu “Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan”.

Pengguna BPJS sendiri juga sudah cukup banyak dari kalangan bawah hingga atas yang sudah mencapai 83 persen atau 224,1 juta dari total jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 269 juta orang. Hal ini sangat berpengaruh di masyarakat Indonesia terutama pengguna BPJS ([katadata.co.id](http://katadata.co.id)). Tidak hanya itu, peserta Jaminan Sosial BPJS mandiri di Kota Surabaya pada hasil survei awal Desember 2019 tercatat sudah memiliki presentase sebesar 88%

atau 2.605.471 dari total keseluruhan jumlah populasi masyarakat Surabaya 2.941.981 penduduk (pustakalewi.com, 2019).

Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik yang diolah Lokadata *Beritagar.id* menunjukkan jumlah penduduk yang menggunakan internet untuk membaca berita *online* sebanyak 50,7 juta orang atau 65,9% dan sebanyak 74,7% atau 77 juta orang merupakan pengguna internet (*beritagar.id*). Maka dari itu peneliti memilih pemberitaan media *online* karena disertai survei tersebut dan juga pemberitaan diportal *online* mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dimuat sangat banyak. Seperti *idntimes*, *detik.com*, *kompas.com*, *liputan6.com*, *cnindonesia.com*, *nasional.kontan.co.id*, *cnbcindonesia.com*, *merdeka.com*, *viva.co.id*, *wartaekonomi.co.id*, dan lain-lain. Selain itu, persentase pembaca berita media *online* di perkotaan sangat besar dimana Surabaya merupakan kota bukanlah perdesaan menjadikan hal ini pendukung sebagai pemilihan media *online*.

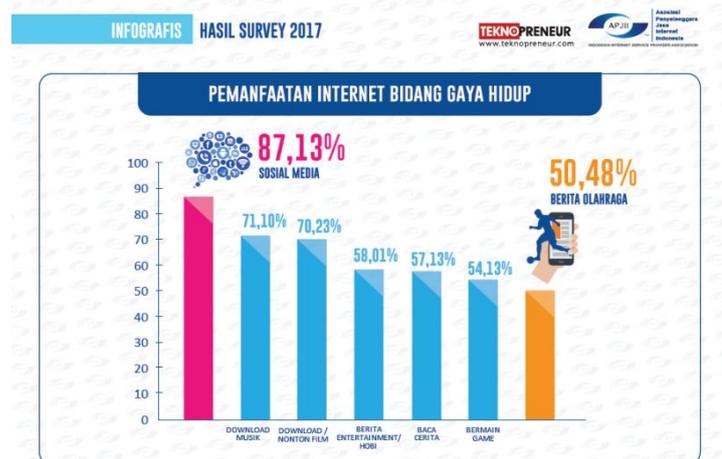
**Gambar I.8.**  
**Data Pemanfaatan Internet Bidang Sosial-Politik**



Sumber: APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Hal lain yang mendukung, media *online* sebagai media pemilihan media untuk mencari berita “Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan”, didukung data yang diperoleh dari hasil survey tahun 2017 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Data pemanfaatan internet bidang sosial-politik menunjukkan berita sosial/lingkungan berada di peringkat tertinggi sebanyak 50,26%. Menurut peneliti, berita “Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan” termasuk dalam kategori sosial/lingkungan karena menyangkut kehidupan sehari-hari.

**Gambar I.9.**  
**Data Pemanfaatan Internet Bidang Gaya Hidup**



Sumber: APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Berdasarkan data hasil survey tahun 2017 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mengenai pemanfaatan internet bidang gaya hidup, peringkat pertama diduduki oleh Sosial Media sebesar 87,13%. Lalu peringkat selanjutnya sebesar 58,01% disusul oleh berita entertainment/hobi dengan peringkat keempat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat mengakses internet untuk baca berita. Peneliti memilih media *online* karena banyak dimuat di portal *online*. Selain dimuat di beberapa portal berita

*online*, berita “Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan” juga terdapat dalam beberapa media sosial, seperti instagram, LINE Today dan Youtube. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat juga bisa membaca berita melalui media sosial yang masih masuk dalam kategori ranah media *online*.

Penelitian tentang pengaruh berita bukanlah pertama kali dilakukan. Ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh berita. Contohnya seperti penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pemberitaan “Ada Apa Dengan Pizza” di Majalah Tempo Edisi 5-11 September 2016 terhadap Corporate Image Pizza Hut*” yang dimiliki oleh Amelia Adeline (2017). Dalam penelitian tersebut memiliki hasil hubungan yang signifikan antara *prominence* dan *the position* dengan pemberitaan “*Ada Apa Dengan Pizza*” di majalah *Tempo* edisi 5-11 September 2016 terhadap *corporate image Pizza Hut*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Amelia adalah indikator berita terdahulu menggunakan judul berita, teras berita, tubuh berita sedangkan penelitian ini menggunakan *Timeliness*, *Proximity*, *Prominence*, *Concequence*, dan *Human Interest*. Tak hanya itu perbedaannya juga terletak pada variabel (Y), dimana penelitian terdahulu menggunakan *corporate image* sedangkan penelitian ini menggunakan opini.

Penelitian yang lainnya yang meneliti pengaruh berita adalah penelitian Ivanna Tandiono (2019) yang berjudul “*Pengaruh Pemberitaan Online Kasus Sariwangi Pailit Terhadap Corporate Image PT Unilever Indonesia Tbk Pada Ibu Rumah Tangga Di Surabaya*”. Dalam penelitian terdahulu menekankan bahwa pengaruh pemberitaan yang terdapat di media online berpengaruh signifikan terhadap *corporate image* PT Unilever Indonesia Tbk. Perbedaan antara penelitian

ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel (Y). Penelitian ini meneliti opini sedangkan terdahulu *corporate image*.

### **I.2. Rumusan Masalah:**

Bagaimana pengaruh pemberitaan *online* kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan terhadap opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai BPJS Kesehatan?

### **I.3. Tujuan Penelitian:**

Bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberitaan *online* kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan terhadap opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai BPJS Kesehatan.

### **I.4. Batasan Masalah:**

Agar penelitian ini tidak keluar dari fenomena sesuai dengan tujuan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Maka peneliti membuat batasan dalam penelitian ini, berikut perinciannya:

- a. Objek penelitian ini yaitu penelitian hubungan antara pengaruh pemberitaan *online* dengan opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai BPJS Kesehatan.
- b. Subjek penelitian ialah publik, secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari pemberitaan *online* kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, yaitu masyarakat peserta mandiri BPJS Kesehatan di Surabaya.

- c. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana peneliti hanya meneliti pengaruh pemberitaan *online* kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan terhadap opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai BPJS Kesehatan.
- d. Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah metode survei dengan instrumen berupa kuesioner.
- e. Tempat penelitian berada di Kota Surabaya, Jawa Timur.

## **I.5. Manfaat Penelitian**

### **I.5.1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan dan referensi mengenai Ilmu Komunikasi, untuk memperkaya penelitian komunikasi massa tentang opini dan pengaruh pemberitaan *online*.

### **I.5.2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak BPJS Kesehatan agar berkembang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan bagi para peserta pengguna BPJS Kesehatan.